

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya jaman, perkembangan teknologi saat ini juga semakin meningkat. Pada saat ini seluruh lapisan masyarakat sudah bisa menikmati berbagai macam teknologi karena cepatnya perkembangan teknologi di dunia. Internet merupakan salah satu teknologi yang paling berkembang. Saat ini internet sudah dimanfaatkan diberbagai bidang, baik dibidang bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Dibidang pemerintahan, pemanfaatan teknologi internet dikenal dengan sebutan *e-government*. Secara sederhana, *e-government* merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. (Hasibuan dan Santoso, 2005).

Sejak beberapa tahun belakangan ini, Inovasi *e-government* di Indonesia sudah dimulai digencarkan. Inovasi tersebut digencarkan karena baik pemerintah pusat maupun daerah menginginkan sebuah sistem yang saling terintegrasi. Menurut (Elysia dkk, 2017) pengembangan *e-government* di Indonesia didukung oleh regulasi yang terkait seperti Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian berdasarkan Undang-Undang ITE No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dan dan yang terbaru adalah Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adanya beberapa regulasi

tersebut menuntut setiap lembaga atau instansi publik untuk mengimplementasikan e-Government dalam tata kelola pemerintah dan pelayanan publik baik di pusat, daerah maupun di desa.

Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2015). Penerapan e-Government desa memerlukan suatu perencanaan yang matang dan menyeluruh sehingga penerapan TIK bisa berjalan sesuai dengan fungsinya dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul pada saat telah diimplementasikan (Asyikin dkk, 2016). Inilah yang mendasari gagasan dan inisiatif dari pemerintah dan masyarakat tingkat desa dalam menjalankan Sistem Informasi Desa Sebagai mana yang diamanatkan dalam pasal 86 ayat 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa desa berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan dan mengembangkan sistem informasi desanya. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan harapan baru yang istimewa untuk pembangunan di tingkat desa. Pada Undang-undang Desa ini memberikan ruang untuk desa sebagai aktor pembangunan, pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan perturan yang ada. Diketahui pula bahwa sistem informasi sangatlah penting dalam sebuah desa. Sistem informasi tersebut dapat diwujudkan dengan adanya *website*. *Website* merupakan salah satu bagian dari *E-Government*.

Proses pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Sistem Informasi

Desa (SID) merupakan bagian dari implementasi *E-Government* yang merupakan alat bantu bagi desa untuk menyelesaikan permasalahan yang sering muncul pada saat pengelolaan data desa seperti administrasi desa, pengelolaan surat menyurat, serta pengelolaan penduduk desa yang meliputi penduduk asli dan penduduk pendatang. Desa berhak untuk mendapatkan akses informasi melalui system informasi desa yang telah dikembangkan. Sistem ini merupakan sistem informasi tepat guna dengan tujuan untuk memajukan masyarakat dengan mempermudah proses pengelolaan data di kantor desa. (Rahimi dkk, 2017)

Betapa pentingnya Sistem Informasi Desa tersebut jika dijalankan oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Dengan adanya SID dapat membuka ruang partisipatif antara masyarakat dan perangkat desa dalam membangun desanya secara demokratis melalui penggunaan *software* terbuka. Secara teknis program ini diharapkan dapat membantu pemerintahan desa dan warganya mendokumentasikan data-data milik desa menjadi lebih mudah

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 mulai mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai salah satu infrastruktur untuk pembangunan desa di Jawa Tengah. Dilansir dari *Katadata* pada tahun sebelumnya Provinsi Jawa Tengah masuk dalam peringkat 10 besar Provinsi dengan E-Government terbaik di Indonesia di bawah provinsi DKI Jakarta yang berada diperingkat 1 (Katadata, diakses 3 November 2018). Pada tahun 2016 Provinsi Jawa Tengah mulai melaksanakan pengembangan SID di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan SID berdasarkan pasal 86 ayat 4 Undang-Undang No 6

Tahun 2014 tentang Desa. Untuk mewujudkan SID di setiap pemerintah desa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa. Adanya Peraturan Gubernur tersebut menjadi sebuah himbaun bagi Pemerintah Daerah di Jawa Tengah untuk melaksanakan SID di tingkat Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah tentunya harus bisa mengimplementasikan SID sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016.

Sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sudah menjalankan SID. Dilansir dari website resmi pemerintah Kabupaten Pati, Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang sudah melaksakan SID sejak tahun 2017. Kabupaten Pati menempati peringkat 10 nasional kabupaten berkinerja terbaik (www.patikab.go.id, diakses 10 November 2017). Penilaiannya meliputi Pertama, pelaksanaan otonomi daerah harus mampu meningkatkan pelayanan publik sesuai kepentingan masyarakat. Kedua, peningkatan pelayanan publik harus berbasis teknologi informasi, dan komunikasi atau *E-Government*. Ketiga, ketepatan penyediaan pelayanan publik berbasis *E-Eovernment* membutuhkan kemampuan dan integritas yang tinggi dari setiap aparatur pemerintah daerah. Keempat, peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis *E-Government* bakal dapat mewujudkan tata kelola pemda yang baik dan aparatur pemda yang bersih.

Menurut hasil Pra penelitian dengan narasumber Ibu Siti Mahmudah selaku Kepala Seksi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, beliau menjelaskan bahwa sebanyak 401 desa di Kabupaten Pati sudah menjalankan SID. Dasar pelaksanaan SID sendiri mengacu

pada pasal 86 ayat 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah. Ibu Siti Mahmudah menambahkan bahwa SID dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menggandeng pihak ketiga atau pengembang dalam melaksanakan SID. Jawa Tengah ada 4 pengembang yang di anjurkan oleh Pemerintah Provinsi, di Kabupaten Pati sendiri dalam melaksanakan SID didampingi oleh Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK). Pada tahap awal pengembangan SID, pemerintah kabupaten Pati membentuk Forum Data. Forum Data adalah dinas-dinas terkait membuat kesepakatan bahwa data-data mereka akan terintegrasi dalam SID yang berisi data-data semua Organisasi Pemerintah Daerah dan semua sistem informasi seperti Sistem Keuangan Desa, data kemiskinan dan juga data kependudukan yang dijadikan satu wadah yang disebut Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA).

Namun dalam melaksanakan SID masih ada masalah yang terjadi yaitu masih ada desa di Kabupaten Pati yang belum terdaftar dalam SID. Masalah lain yaitu website desa yang muatan SID nya tidak sesuai dengan Pasal 10 Ayat 1 Pergub Jawa Tengah No 47 Tahun 2016. Kemudian muatan SID antara satu desa dengan desa yang lainnya yang berbeda. Masalah lainnya yaitu adanya website desa yang tidak update memberi informasi bahkan masih ada muatan SID yang tidak ada kontennya. Adanya masalah tersebut menunjukkan bawah pelaksanaan SID di Kabupaten Pati masih kurang optimal. Permasalahan tersebut juga diperkuat

dengan data-data yang ada di *website* Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI).

Berdasarkan *website* Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI), salah satu desa yang kurang optimal adalah Desa Guyangan Kecamatan Kecamatan Kabupaten Pati Desa Guyangan merupakan desa yang peringkat SID nya paling bawah di Kabupaten Pati (www.monitor.sideka.id, diakses 7 Januari 2019). Desa Guyangan juga mempunyai akun sosial media berupa Facebook dan juga Website desa. Dengan adanya akun sosial Media dan Website desa tentu diharapkan pemerintah Desa Guyangan dapat memberikan informasi ke masyarakat desa mau mengenai perkembangan desa mulai dari pembangunan, promosi produk unggulan, hingga laporan pengelolaan anggaran dana desa dengan dengan cepat dan efisien baik yang ada di desa maupun sedang berada diluar desa.

Manfaat lainnnya adalah pemerintah desa bisa meningkatkan kualitas pemerintahan desa yang akuntabilitas dan transparansi. Namun faktanya akun Facebook dan Website Desa Guyangan tidak dimaksimal dalam penggunaannya. Dari data website resmi Desa Guyangan dapat penulis ketahui bahwa masih banyak kekurangan dalam website desa tersebut. Contohnya website tersebut kurang begitu update informasi karena dapat dilihat terkakhir update berita pada tanggal 26 Juli 2018. Kemudian kurang informasi mengenai data kependudukan, profil desa, profil perangkat desa hingga tidak adanya informasi mengenai anggaran desa dan muatan SID nya tidak sesuai dengan Pasal 10 Ayat 1 Pergub Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Banyaknya kekurangan tersebut kedepannya akan menghambat proses *good government* karena pemerintah desa

tidak maksimal dalam melaksanakan SID. Padahal seharusnya masyarakat desa dapat mendapatkan informasi lebih efektif dan efisien dengan adanya SID.

Adanya permasalahan dalam pelaksanaan SID maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pati harus benar-benar tegas dan menjalankan tugas-tugasnya tentang SID agar Pergub No 47 Tahun 2016 dapat diimplementasikan dengan optimal. Karena apabila SID dilaksanakan secara optimal maka dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Disisi lain juga dapat sebagai media dalam memperoleh, mengelola dan menyajikan data serta informasi desa dan kawasan perdesaan.

Berdasarkan hal di atas, maka dalam penelitian ini akan mendeskripsikan lebih lanjut mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Pemerintah Kabupaten Pati.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Pemerintah Kabupaten Pati ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian disini agar lebih mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Pemerintah Kabupaten Pati.

1.3.2 Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan, serta dapat memperkaya kajian terkait penelitian Sistem Informasi Desa

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengimplementasikan kebijakan Sistem Informasi Desa, serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai teknis dan strategi dari implementasi Sistem Informasi Desa

1.4. Tinjauan Pustaka

No	Judul	Penulis	Jurnal	Hasil
1	Penerapan Knowledge Management System Berbasis Informasi Desa Untuk Meningkatkan Layanan Publik Desa Dukuh Karya	Purwantoro, Yuyun Umaidah, Ultach Enri	Jurnal TECHNO Nusa Mandiri Vol. 15, No. 2 September 2018	Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa SID dijadikan wadah bagi Knowledge management system. Sistem Informasi Desa (SID) menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Dengan adanya perubahan paradigma pembangunan desa membuat SID menjadi penting peranannya. Implementasi KMS merupakan suatu cara bagi perangkat desa untuk mengidentifikasi, membuat, merepresentasikan,

				mendistribusikan, dan memungkinkan pengadaptasian wawasan dan pengalaman yang terdiri dari pengetahuan
2	Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Tahun 2016	Apriyansyah, Isnaini Maullidin, Eko Priyo Purnomo	JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik) Volume 4 No. 1, Juni 2018 :10-24	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) didukung oleh 6 indikator, dan dari ke 6 indikator tersebut dapat diurutkan yang paling efektif ada kualitas informasi, kualitas pelayanan, kualitas sistem, kepuasan pengguna, <i>net benefit</i> , dan yang terakhir ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia berada pada posisi kurang efektif, hal tersebut dikarenakan para pegawai belum semuanya bisa membuat konten terkait informasi yang baik .
3	Sistem Informasi Berbasis Web Pada Desa Tresnomaju Kecamatan Negerikaton Kab. Pesawaran	Andreas Andoyo, M.T.I., Ahmad Sujarwadi	Jurnal TAM (Technology Acceptance Model) Volume 3 Desember 2014	Permasalahan yang ada di Desa Tresnomaju mengenai terbatasnya akses informasi dan belum adanya akses yang cukup luas kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya e-government maka informasi yang ada dapat diakses setiap saat secara online oleh semua masyarakat Desa Tresnomaju yang memungkinkan penyediaan data selalu mutakhir.
4	Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Keuangan Desa Berbasis Web	Arif Susanto, Anteng Widodo	Prosiding SNATIF Ke-4 Tahun 2017	Fokus penelitian ini terdapat pada alur dari sistem informasi keuangan di desa. Karena sistem informasi keuangan desa berbasis web diperlukan sebagai solusi untuk pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsinya, khususnya dalam hal keuangan desa yang sangat

				memerlukan suatu alat/tool yang bisa digunakan untuk mengelolanya secara akurat, cepat, akuntabel, transparan sampai terarsip secara digita
5	Sistem Layanan Mandiri Di Kantor Desa Berbasis Web	Rezki Kurniati, Jaroji, Agustiawan	Jurnal Inovtek Polbeng - Seri Informatika, Vol. 3, No. 1 , Juni 2018	Sistem layanan mandiri mampu mengidentifikasi NIK dengan akurat, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan mandiri di kantor desa. Sistem layanan mandiri dapat memperpendek rantai pengurusan surat-surat keterangan dan pengantar dari kantor desa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun memiliki konsekuensi harus lengkapnya database kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah desa.
6	Implementasi Kebijakan Penertiban Dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda	Drs. Endang Erawan, M.Si, Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si, Desi Alfiani	eJournal Administrasi Negara, Volume 6 , Nomor 1, 2018: 7077-7089	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penertiban dan Penanggulangan Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda belum berjalan dengan maksimal. Walaupun pelaksanaan razia telah rutin dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, keberadaan Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda masih saja terus ada terutama pada hari-hari besar dan Idul fitri keberadaan mereka semakin bertambah setiap harinya, hal tersebut karena pemberian sanksi yang di berikan tidak menimbulkan efek jera.

7	Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis TIK	Rahimi Fitri, Arifin Noor Asyikin, Agus Setiyo Budi Nugroho	Jurnal Positif, Volume 3, No.2, 2017 : 99 - 105	Pengembangan SID dalam penelitian ini dengan menerapkan tahapan metode siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau istilah lainnya adalah software development life cycle (SDLC) dengan tahapan analisis, perancangan, pengkodean, uji coba dan implementasi. Pengembangan SID ini diharapkan dapat memberikan inovasi bagi kantor pemerintahan desa untuk dapat meningkatkan kinerja perangkat desa ditinjau dari segi kualitas pelayanan terhadap masyarakat, produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan produktifitas
8	Partisipasi Warga terhadap Sistem Informasi Desa	Fadjarini Sulistyowati /MC, Candra Rusmala Dibyorn	Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Volume 2, Nomor 1, Juli 2013, hlm. 579-587	Dari hasil penelitian didapatkan: 1. Partisipasi masyarakat terhadap keberadaan sistem informasi desa diawali pada saat sistem ini diberlakukan 2. Kemunculan partisipasi masyarakat karena adanya sinergi yang antara aparat desa, LSM dan masyarakat. 3. Partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan dengan upaya mengontrol keberadaan sistem informasi desa bagi masyarakat. 4. Program SID yang diinisiasi dari masyarakat merupakan sinergi kerjasama antara masyarakat, aparat desa dan CRI.
9	Upaya Membangun Sistem	Nunik Maharani Hartoyo,	Jurnal Komunikasi. 01 (2016) 48-57	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum warga telah merintis upaya

	Informasi Desa yang Bermakna	Ika Merdekawati		pengelolaan dan pengembangan SID sebagai salah satu amanat UU Desa yang akan segera diberlakukan. Meski demikian, pengelola SID yang telah terbentuk belum bekerja optimal karena hambatan sarana, prasarana dan kondisi sosial kemasyarakatan desa yang tengah dalam proses Pemilihan Kepala Desa. Selain itu, basis masyarakat yang masih jauh dari melek internet serta masalah SDM yang terbatas juga turut menjadi faktor belum dikembangkannya SID berbasis internet di Desa Citali.
10	Pengembangan Website dan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Tulungagung	Fahrur Rozi, Tomi Listiawan	JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) Volume 02, Nomor 02, Desember 2017 : 107 - 112	Penelitian pengembangan Web dan Sistem Informasi Desa ini dengan memanfaatkan sebuah open source yaitu OpenSID mampu diterapkan dan berjalan dengan baik. Web dan SID ini nantinya akan dapat digunakan dengan baik oleh aparat desa dalam menjalankan pekerjaannya. Semua fitur yang terdapat Web dan SID dapat berjalan dengan baik.

Adapun dalam proposal penelitian ini, peneliti akan mengangkat bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Pati. Metode yang akan digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.

Hasil yang akan di temukan adalah berupa gambaran implementasi kebijakan dengan menggunakan metode analisis data deskriptif.

Dalam penelitian terdahulu yang diterangkan secara singkat dan jelas diatas, dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang implementasi teknologi sebagai penguat tata kelola pemerintah desa. Untuk penelitian yang diatas terfokus pada manfaat sistem informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa baik dari pelayanan publik maupun keuangan desa. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang pengembangan sistem informasi dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.

Setelah melihat pembahasan singkat dari 10 penelitian terdahulu dapat dilihat persamaan dari penelitian terdahulu, persamaan yang didapat dari beberapa penelitian terdahulu dilihat dari *E-Government* sebagai sistem informasi. Posisi riset yang ditulis oleh penulis bukan langsung berfokus pada pengimplimentasian Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa ditingkat pemerintah desa, namun penelitian ini berfokus pada pengimplemetasian ditingkat pemerintah daerah. Maka dari itu pembahasan yang dilakukan meliputi dinas-dinas terkait yang bertanggung jawab atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa.

1.5. Kerangka Dasar Teori

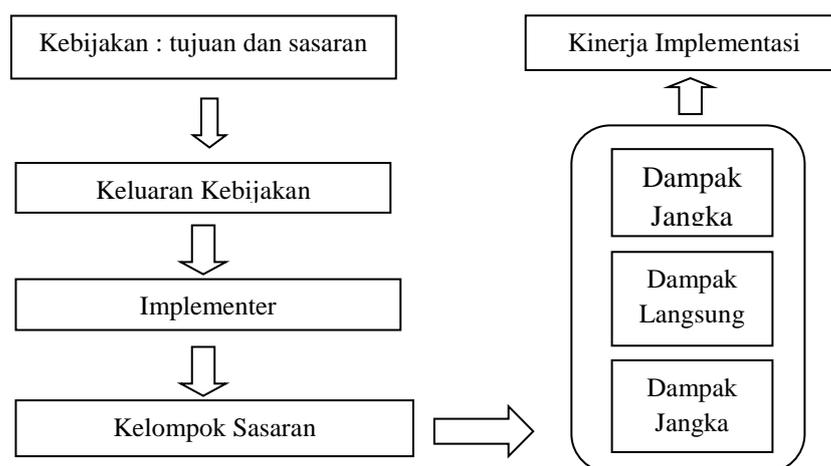
1.5.1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (dalam Pratiwi,2017) Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikairkan dengan program. Tahap implementasi kebijakan menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar – benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan (Indiahono, 2009). *Output* dapat dikatakan sebagai hasil langsung dari kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan *outcome* merupakan sebuah dampak dari suatu kebijakan tersebut

Menurut Agus dan Ratih (dalam Ardevina,2017) mengatakan bahwa proses implementasi program berangkat dari adanya suatu kebijakan, dan telah dijelaskan pada pembahasan tersebut, maka proses tersebut dapat dilihat pada gambar berikut

Bagan 1.1
Proses Implementasi



Sumber : Ardevina, Tantia. Implementasi Kebijakan Program Desa Ramah Anak Terhadap Anak Berhadapan Hukum Di Desa Caturharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2017. Yogyakarta. 2017

Menurut Mazmanian dan Sabastiar (dalam Zatrianssya,2017) didalam mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijaksanaan Negara, baik itu menyangkut usaha usaha pengadministrasi maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Menurut Ernest R. Alexander (dalam Mutiarin, 2014.) implementasi adalah proses interaktif terus menerus yang kompleks yang meliputi interaksi dengan lingkungan, stimulasi kebijakan, program dan hasil, yang keseluruhannya sangat tergantung pada muatan spesifik dan waktu terjadinya. Menurut Wahab dalam buku (Sumaryadi, 2010) menyebutkan ada 3 unsur dalam proses implementasi:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
2. Target grup, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program ini, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksanaan (implementor), baik organisasi atau perorangan untuk bertanggungjawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Menurut Van Meter dan Van Horn didalam buku (Sumaryadi, 2010) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu / pejabat – pejabat atau kelompok –

kelompok pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

b. Model Implementasi Kebijakan

1. Model Grindle

Pada Model Marilee S. Grindle isi kebijakan dan konteks implementasi akan menentukan sebuah implementasi kebijakan. Isi dari kebijakan itu sendiri harus mencakup berbagai hal seperti berikut :

- a. kebijakan yang dapat mempengaruhi sebuah kepentingan
- b. hasil dari jenis dan mafaatnya
- c. perubahan sesuai dengan apa yang
- d. posisi sebuah kebijakan yang berjalan
- e. siapa yang menjalankan sebuah program
- f. jumlah sumberdaya pelaksana yang digunakan

sedangkan konteks implementasinya adalah:

- a. keterlibatan strategi aktor, kepentingan dan kekuasaan.
- b. Karakteristik seperti apa yang dimiliki oleh lembaga dan penguasa
- c. memiliki daya tangkap dan juga tingkat kepatuhan.

2. Model Model George C. Edward III

Menurut Edward (dalam Winarno,2014) ada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan' Transmisi, artinya bahwa sebelum pejabat/pelaksana dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Kejelasan, artinya bahwa jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Konsistensi, Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber daya pelaksana

Untuk mendukung terlaksananya suatu implementasi maka, pelaksana kebijakan membutuhkan sumber-sumber yang diperlukan seperti; staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Staf, merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kebijakan. Hal tersebut juga harus didukung oleh jumlah sumber daya manusia yang cukup, cakap (keahlian), serta harus memiliki pengetahuan dalam melaksanakan kebijakan. Informasi, menjadi sumber pelaksana yang cukup penting dalam menjalankan sebuah kebijakan.. Informasi terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, dalam hal ini pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana dalam bersikap. Kedua, merupakan adanya data yang berisi tentang ketaatan pelaksana kebijakan yang lain terhadap adanya peraturan pemerintah. Wewenang, merupakan sumber daya lain yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Wewenang sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Fasilitas, merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan seperti. gedung, agar memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Ada dua indikator yang dikemukakan oleh Edwards. Menurut Edwards menyatakan ada sebuah kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan. Namun adanya sebuah kepentingan dari pelaksana kebijakan yang lain akan menimbulkan pertentangan secara langsung antar pelaksana

kebijakan. Hanya saja masalah yang terjadi adalah apabila masih ada personil yang lalai dalam melaksanakan kebijakan mereka tidak segera diganti dengan pelaksana kebijakan yang lebih berkompeten.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III (dalam Agustinus, 2006) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1) Pengangkatan birokrasi, dalam proses pengangkatan birokrat lembaga atau organisasi harus dapat memilih pelaksana kebijakan yang memiliki sebuah dedikasi, tanggung jawab, dan juga berkompeten dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Karena hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan adalah karena adanya pelaksana kebijakan yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pejabat-pejabat di atasnya.

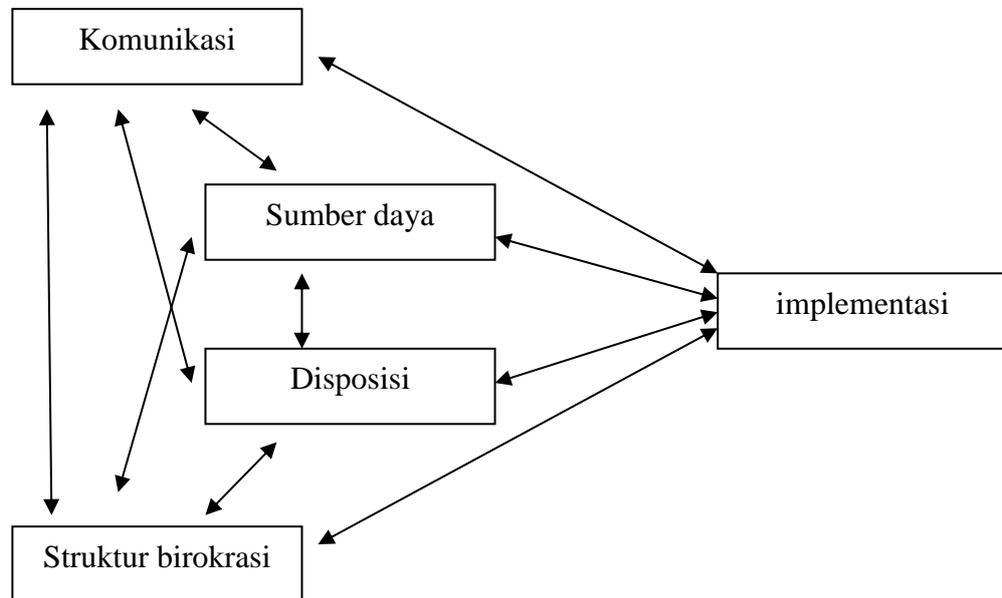
2) Insentif pada dasarnya sebuah teknik untuk memanipulasi sikap pelaksana kebijakan agar mereka semangat untuk menjalankan tugas-tugasnya. Caranya yaitu dengan memberi atau menambah keuntungan kepada pelaksana kebijakan agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik. Dengan adanya tambahan keuntungan kepada pelaksana tentunya hal tersebut akan menjadi faktor pendukung yang baik. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran–ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP), dengan menggunakan prosedur ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. fragmentasi yang menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, di mana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar berita/instruksinya akan terdistorsi.

Bagan 1.2

Model Implementasi Kebijakan Edward III



Sumber : Dwiyanto Indahono, 2009, *kebijakan publik*, berbasis Dynamic Policy Analisis, Hal 33

3. Model Mazmania dan Sabaiter

Model Mazmania dan Sabatier (dalam Nugroho, 2014) disebut model kerangka analisis implementasi. Ada 3 variable yang sudah dikelompokkan menurut mereka, yaitu :

- a. variabel independen, yaitu adanya sebuah teknik pelaksanaan dan juga masalah dengan mengukur seberapa mudah atau tidaknya masalah yang dikendalikan. Bisa juga berupa keberagaman objek dan juga perubahan yang dikehendaki.
- b. variabel intervening, yaitu variabel yang memiliki indikator sebuah keberhasilan kebijakan berupa kejelasan dan juga konsisten. Selain itu

indikator lain yang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan adalah adanya indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan partisipasi konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

c. variabel dependen, yaitu sebuah proses implementasi kebijakan dengan memperhatikan 5 tahapan pemahaman dari pelaksana kebijakan. 5 tahapan pemahaman tersebut meliputi kepatuhan objek, hasil nyata yang dicapai, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut.

4. Model Metter dan Horn

Model ini dikenalkan oleh duet Donald Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Nugroho, 2014) dengan mengembangkan model implementasi kebijakan klasik. Model tersebut diasumsikan bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Beberapa variabel kritis yang dimasukkan sebagai variabel yang saling mempengaruhi dan menyangkut dalam implementasi publik adalah:

- a. Sumber daya dan tujuan standar, yang mendorong ke komunikasi antar organisasi dan penegak aktivitas.
- b. Karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik, yang pada gilirannya dapat membangkitkan perilaku pelaksana kebijakan agar dapat mencapai kinerja kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho,2014), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

1. Standar dan sasaran kebijakan.

Supaya dalam pelaksanaan kebijakan tidak terjadi kesalahan komunikasi maka sebuah kebijakan harus memiliki sebuah tujuan dan juga sasaran yang jelas. Oleh sebab itu kebijakan harus mempunyai sebuah standar minimal yang harus jelas dan juga terukur. Sehingga jika sebuah kebijakan sudah jelas dan terstruktur dalam pelaksanaannya tidak akan terjadi kesalahpahaman dan juga konflik antar pelaksana kebijakan.

2. Sumberdaya.

Dalam sebuah kebijakan peran sumber daya manusia sangat penting karena sumberdaya manusia memiliki 2 peran sekaligus yaitu sebagai subjek maupun objek. Selain itu sumberdaya yang juga diperlukan adanya dukungan dari sumberdaya materi dan juga sumber daya metoda.

3. Hubungan antar organisasi

Dalam melaksanakan kebijakan perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar instansi. Komunikasi dan koordinasi merupakan unsur yang penting dalam mewujudkan hubungan antar instansi yang baik. Koordinasi dan komunikasi yang baik akan mengurangi kesalahpahaman antar instansi selain itu juga agar tidak ada konflik antar instansi..

4. Karakteristik agen pelaksana.

Norma, pola hubungan dan struktur dalam birokrasi akan mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan. Sehingga untuk mewujudkan implementasi yang baik, pelaksana harus berpedoman pada indikator-indikator tersebut supaya mengetahui karakter-karakter para pelaksana

5. Disposisi pelaksana kebijakan

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

6. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

1.5.2. Sistem Informasi Desa

a. Definisi Sistem Informasi Desa

Menurut Wijoyono & Nasir (2013) Sistem Informasi Desa (SID) merupakan suatu perangkat yang dapat digunakan untuk mendukung dan untuk

media menginformasikan suatu organisasi struktural yang berada di tingkat desa dalam mengelola potensipotensi yang ada di suatu desa tersebut. Sistem informasi desa ini pula terdiri dari bagian-bagian yang berbasis teknologi terkini yang dapat dikelola dengan mudah oleh lapisan-lapisan masyarakat di suatu desa. Dinamakan sistem informasi karena berisikan beberapa konten-konten yang menjadi bahan utama suatu informasi. Wadah dari konten-konten tersebut biasanya berbentuk *database* dari berbagai aplikasi yang ada pada sistem komputer. Dengan adanya sistem-sistem yang ada di komputer atau yang sering disebut dengan perangkat lunak inilah kedepannya akan mempermudah pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi struktural terkait dengan pengelolaan potensi-potensi yang ada dan dalam hal memberikan pelayanan publik akan dapat lebih efisien, efektif, cepat, dan akurat.

Menurut (Apriansyah, 2018) Ada tiga hal dasar yang dikelola didalam SID, selain pelayanan publik, ada juga pemetaan terhadap aset/sumber daya desa dan perencanaan pembangunan. Pelayanan publik dan pelayanan administrasi menjadi salah satu fungsi yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik dalam ranah administrasi menjadi salah satu faktor pembaharuan data dasar kependudukan di dalam SID, yang mempunyai manfaat dan tujuan yang baik. SID yang aktif dan rutin digunakan dalam pelayanan administrasi publik akan menjadikannya selalu terbaru datanya dan keberadaannya tersampaikan langsung secara nyata kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Wilhem Wau (dalam Along,2016) SID dibangun dengan berbasis komputer dan *website*, sehinggainformasi ini dapat diakses oleh

setiap warga. Sedangkan lisensi SIDdikembangkan dalam *platform* sistem perangkat lunak bebas dan terbuka, (*free and open source software*) yang bearti dapat digunakan, disalin, didistribusikan, dipelajari, dimodifikasi maupun ditingkatkan kinerjanya oleh siapapun dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

b. Indikator Sistem Informasi Desa

Menurut Heeks (dalam Azalia, 2017) keberhasilan dan kegagalan dari suatu sistem informasi elektronik berkaitan dengan berbagai indikator, diantaranya adalah sebagai berikut ini:

1. Infrastruktur hukum. Dimana suatu perangkat hukum digunakan untuk mencegah suatu kejahatan digital, melindungi sebuah data pribadi maupun melindungi keamanan suatu informasi dan transaksi perorangan, perusahaan maupun lembaga pemerintah.
2. Infrastruktur kelembagaan. Pada sebuah kelembagaan, untuk menggarap dan memberikan layanan informasinya maka sebuah sistem harus memiliki instansi khusus. Sehingga sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dan semestinya.
3. Infrastruktur Sumber Daya Manusia. Sistem kepegawaian perlu sangat dikembangkan agar dapat menarik sumber daya manusia berkualitas yang profesional dalam bidang telematika untuk ikut berperan dalam pengelolaan suatu sistem informasi yang dijalankan pemerintah.

4. Infrastruktur teknologi. Teknologi yang digunakan memang relatif mahal, namun dalam hal ini selain dapat kerjasama dengan berbagai pihak, pemerintah juga harus melakukan perawatan dan pengadaan barang-barang baru agar teknologi yang dimiliki dapat mendukung berjalannya sistem tersebut.

c. Manfaat Sistem Informasi Desa

Adapun manfaat dari penggunaan SID apabila diimplementasikan, diantaranya sebagai berikut (Ridwan, 2016):

1. Pemerintah desa lebih efisien Dengan penggunaan SID tersebut, kantor desa dapat menyediakan layanan surat keterangan pada warganya jauh lebih cepat dibandingkan dengan cara manual, dengan SID ini data penduduk yang sebelumnya sudah tersimpan dapat diisikan secara otomatis dan dapat langsung dicetak tanpa menunggu hari berikutnya seperti dengan menggunakan cara manual yang relatif memakan waktu hingga berhari-hari.

2. Pemerintah desa akan lebih efektif dalam menyimpan data yang dibutuhkan oleh desa. Selain itu data yang dimiliki akan lebih akurat dibandingkan dengan apabila belum memanfaatkan SID sehingga hasil yang ingin dicapai oleh desa lebih memiliki sasaran dan tujuan.

3. Pemerintah desa dalam mengelola informasi terkait desanya akan akan mudah dipahami dan udah diakses oleh masyarakat dengan memnfatakan website desa ataupun meida sosial desa. Oleh sebab itu dengan SID ini pemerintah desa akan lebih transparan.

4. Dengan memberi informasi tentang informasi perencanaan, kegiatan pembangunan, penggunaan dana desa dan sebagainya di dalam SID maka secara otomatis akan mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel. Selain itu, pemerintah desa dimudahkan dalam membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan, penggunaan dana desa, dsbnya.

5. Pelayanan publik yang lebih baik SID kantor desa akan lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan fungsi dan tugas mereka. Karena dengan adanya SID masyarakat akan dimudahkan dalam mengakses kebutuhan yang diinginkan terkait desa

6. Masyarakat akan diuntungkan karena mereka diberi kemudahan dalam berbagai macam informasi tentang desa. Informasi tersebut bisa berupa data kependudukan, perencanaan, aset, anggaran dan sebagainya akan terekam secara elektronik..

7. Mudahnya masyarakat dalam mengakses SID akan mewujudkan masyarakat yang peduli dengan desa. Bentuk kepedulian itu bisa berupa adanya masyarakat desa yang peduli dengan pembangunan desanya. Hal tersebut merupakan bentuk partisipasi warga dalam mewujudkan pemerintah desa yang baik. Partisipasi masyarakat lainnya bisa berupa memberi usulan dan masukan kepada pemerintah desa.

Sistem Informasi Desa kedepan dapat dikembangkan untuk menjalankan setidaknya empat fungsi utama menurut (Lumbung Komunitas, 2014) sebagai berikut :

1. Fungsi media transparansi dan informasi
2. Fungsi perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa
3. Fungsi interkoneksi antara desa dengan supra desa
4. Fungsi promosi unggulan desa

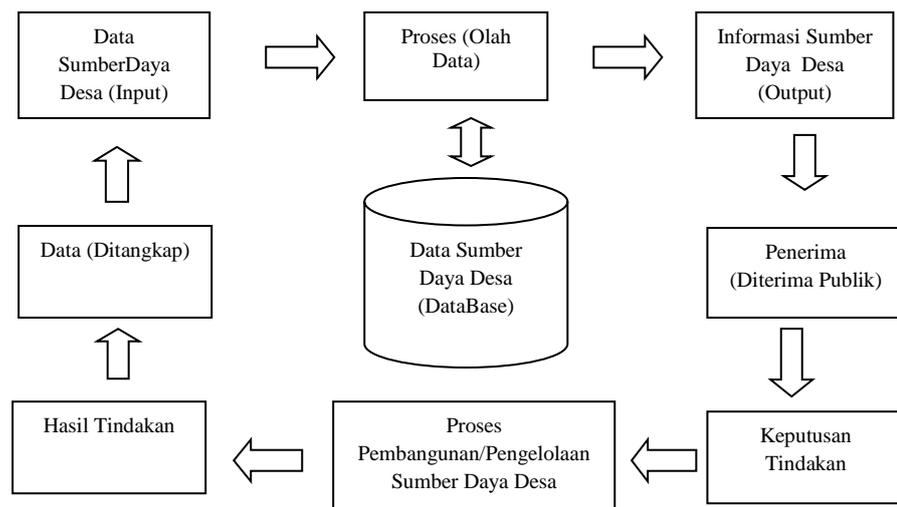
d. Tujuan membangun SID

Menurut (Wijoyono,2016) tujuan SID terdiri dari :

1. Pemetaan kondisidan potensi desa(data akurat &mutakhir)
2. Penguatan kualitas pelayanan publik
3. Penguatan perencanaan dan pengawasan pembangunan desa kawasan.

Bagan 1.3

Siklus manajemen SID



Sumber : Wijoyono, Elano. *Perumusan Konsep Pendidikan dan Replikasi Inisiatif SID di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang, 2016

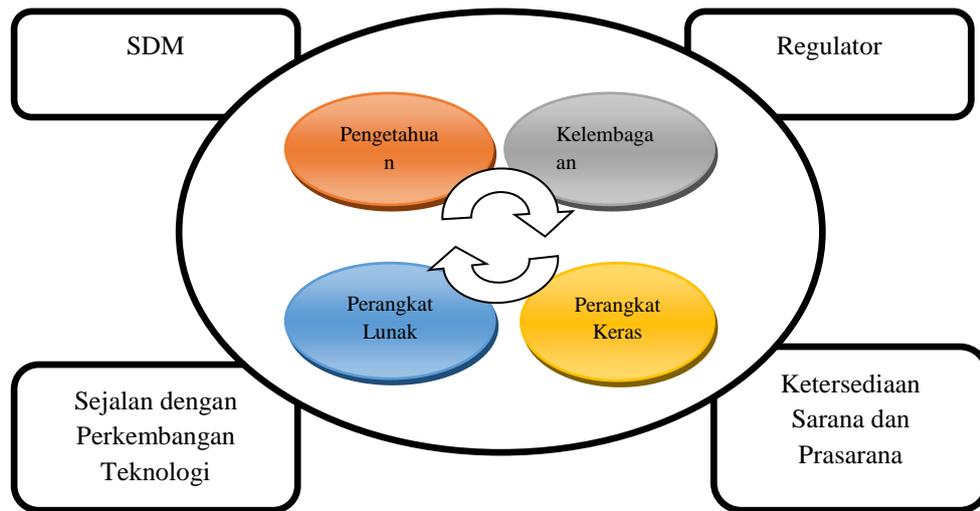
Dari gambar yang dijelaskan di atas menjelaskan mengenai siklus manajemen Sistem Informasi Desa (SID), dimana gambar tersebut menjelaskan bahwa siklus manajemen SID terdiri dari proses dan pada poin proses ini dilakukan olah data yang akan diterima untuk melanjutkan kedalam tahap berikutnya yaitu tahap informasi sumber daya desa dimana dalam tahap ini akan mendapatkan output untuk melaksanakan kegiatan, tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga diserahkan kepada masyarakat dan ketika sudah diterima oleh publik maka melakukan tahap selanjutnya yaitu membuat keputusan tindakan. Ketika empat tahap proses tersebut sudah dilaksanakan maka akan melakukan langkah untuk melaksanakan proses pembangunan atau pengelolaan sumber daya desa yang berguna untuk membentuk kesejahteraan masyarakat dan ketika proses tersebut sudah dilaksanakan maka akan melihat hasil tindakan yang dilakukan ketika proses tersebut apakah memberikan hasil dan tindakan yang sesuai target atau kurang memenuhi target. Dari proses tersebut akan mendapatkan data melalui hasil dari tindakan, dan data yang diperoleh itu akan menjadi input sebagai data sumber daya desa. Beberapa siklus yang sudah dijelaskan tersebut yang nantinya akan mendapatkan hasil akhir sebagai data dasar sumber daya desa atau bisa disebut dengan database.

e. Prasyarat dan komitmen desa pelaksana SID

Menurut (Wijoyono,2016), prasyarat dan komitmen desa pelaksana SID digambarkan dengan diagram sebagai berikut :

Bagan 1.4

Prasyarat dan Komitmen pelaksana SID



Sumber : Wijoyono, Elano. *Perumusan Konsep Pendidikan dan Replikasi Inisiatif SID di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang, 2016

Gambar yang dijelaskan di atas yaitu membahas tentang prasarat dan komitmen dalam penerapan SID, dimana didalam penerapannya harus memperhatikan empat poin penting yang saling berhubungan diantaranya:

- a. kelembagaan, dalam hal ini kelembagaan yang terbentuk harus memperhatikan regulasi aturan yang berlaku dalam penerapan SID agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada.
- b. pengetahuan, pengetahuan yang dimaksudkan disini yaitu sumber daya manusia (SDM) karena SDM lah yang nantinya akan melaksanakan proses penerapan SID dan dengan begitu tentu membutuhkan SDM yang memiliki pengetahuan di bidang yang bersangkutan dengan penerapan SID agar ketika muncul suatu kendala dapat teratasi dengan baik.

c. perangkat keras, jika berbicara mengenai perangkat tentu perlu adanya sarana dan prasarana yang mendukung agar penerapan SID dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

d. perangkat lunak, perangkat lunak yang ada disini yaitu lebih kepada software yang ada di perangkat keras itu sendiri dan juga harus memperhatikan perkembangan teknologi yang ada karena harus bisa sesuai dengan perkembangan teknologi tersebut.

1.6. Definisi Konseptual

7.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan sebuah pembuktian atas proses kebijakan yang telah dibuat dan sebagai bukti hasil apa yang telah terjadi dari pembuatan kebijakan tersebut, dimana implementasi kebijakan dalam hal ini yaitu untuk melihat bagaimana kinerja serta dampak dari kebijakan.

7.2. Sistem Informasi Desa

Sistem informasi merupakan salah satu sarana dimana seseorang bisa mendapatkan informasi yang jelas dengan harapan akan mendapatkan manfaat dari informasi yang sudah di terima itu sendiri. Sistem Informasi Desa (SID) itu sendiri mulai diterapkan karena untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan dan/atau mengetahui data serta potensi-potensi yang ada di Desa, yang nantinya SID itu sendiri akan dikelola oleh organisasi struktural di Desa

1.7. Definisi Operasional

Tabel 1.1.

Ukuran Keberhasilan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Pemerintah Kabupaten Pati

No	Variabel	Indikator
1	Komunikasi	a.transmisi b. kejelasan c. konsisten
2	Sumber Daya Pelaksana	a. staff yang memadai. b. informasi c. wewenang c.fasilitas yang cukup
3	Disposisi	a.pengangkatan birokrat b. insentif
4	Struktur Birokrasi	a. Standar Operasional Prosedur (SOP). b.fragmentasi

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Pemerintah Kabupaten Pati. Kualitatif menurut Moleong (2016) merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan dapat dihasilkan sebuah kesimpulan analisis deskriptif terkait kesiapan pemerintah Kabupaten Pati dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka lokasi yang diambil dalam penelitian ini ialah di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena Sistem Informasi Desa ditangani langsung dinas terkait. Diharapkan lokasi penelitian yang diambil dapat mempermudah serta memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian.

1.8.3. Unit Analisis Data

Unit analisa data adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Dalam penelitian ini unit analisa datanya adalah Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 1.2
Unit analisis data

No	Sumber informan utama	Jabatan
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati	Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten pati

1.8.4. Jenis Data

1. Data Primer

Arikunto (2006) menyebutkan bahwa data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.

Tabel 1.3
Data Primer

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Gambaran umum pelaksanaan Pergub Jawa Tengah No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah.	1. Siti Mahmudah selaku Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati 2. Paryadi selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati	Wawancara
2	Capaian hasil, manfaat dan dampak pelaksanaan Pergub Jawa Tengah No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah.	1. Siti Mahmudah selaku Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati 2. Paryadi selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati	Wawancara
3	Sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan implementasi Pergub Jawa Tengah No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah	1. Siti Mahmudah selaku Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati 2. Paryadi selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati	Wawancara
4	Faktor pendukung dan penghambat implementasi Pergub Jawa Tengah No. 47	1. Siti Mahmudah selaku Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas	Wawancara

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati 2. Paryadi selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati	
---	--	--

2. Data Sekunder

Secara sederhana dapat diartikan sebagai data tertulis yang didapat dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer dan untuk keperluan pembahasan.

Tabel 1.4

Data Sekunder

No	Nama Data	Sumber
1	Daftar desa pelaksana SID di Kabupaten Pati	https://sideka.patikab.go.id/
2	Regulasi dan SOP penyelenggaraan pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati
3	Peringkat Kabupaten Pati dalam pelaksanaan E-Government	https://www.patikab.go.id
4	Peringkat Provinsi Jawa Tengah di dalam pelaksanaan SID di Indonesia	https://databoks.katadata.co.id
5	Data peringkat kualitas SID di Kabupaten Pati	https://monitor.sideka.id

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan judul penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik, teknik yang utama yakni wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Menurut Moleong (2016) wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang dilakukan oleh dua pihak untuk mendapatkan informasi tertentu. Pihak yang mengajukan pernyataan disebut interviewer (pewawancara) sedangkan pihak yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut disebut *interview* (pihak yang diwawancarai). Wawancara dibagi atas dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara berupa urutan daftar pertanyaan, sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan di luar daftar pertanyaan namun masih dalam konteks penelitian yang dilakukan. Dalam kegiatan wawancara dalam penelitian ini, data dan informasi yang dibutuhkan yaitu terkait implementasi Peraturan Gubernur Jawa tengah No 47 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa. Pada penelitian ini pihak yang akan diwawancarai adalah Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati

b. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006) mendefinisikan bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan agenda.

1.8.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini 4 komponen analisis antara lain: yang pertama ada pengumpulan data, kedua reduksi data dan ketiga penyajian data selanjutnya penarikan kesimpulan. Menurut Moelong (2004), Analisis data adalah suatu proses yang mengurutkan antara pola, kategori dan satuan uraian dasar, hal tersebut dapat menemukan tema dan tempat sebagai dirumuskannya hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Beberapa langkah-langkah analisis data Menurut Miles dan Huberman (1992), antara lain:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan pada pengumpulan data harus menentukan strategi penmgumpulan data yang dipandang tepat sebagai data yang relevan dan menentuka suatu fokus serta pendalaman data pada.

2. Reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang belum diolah dari lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, maka demikian dari reduksi data dimulai sejak peneliti telah memfokuska wilayah penelitian.

3. Penyajian data, yaitu suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh dri berbagai jenis seperti jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap dengan apa yang diteliti langsung di tempat lapngan dengan menyusun pola-pola pengarahana dan sebab akibat.